

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Reformasi yang digulirkan di Negeri ini telah memberikan arah perubahan yang cukup besar terhadap tatanan pemerintahan di Indonesia. Setelah runtuhnya masa Orde Baru, era reformasi di Indonesia telah membawa perubahan terhadap sistem politik, sosial, kemasyarakatan serta ekonomi sehingga menimbulkan tuntutan yang beragam terhadap pengelolaan pemerintah yang baik. Salah satu perubahan besar dalam aspek ekonomi adalah perihal pemerintahan daerah atau otonomi daerah. Hal tersebut ditandai dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yang mana Undang Undang tersebut merupakan titik awal berjalannya otonomi daerah (reformasi pemerintahan daerah dan reformasi sistem pengelolaan keuangan daerah di indonesia). Kedua undang-undang tersebut telah membawa perubahan mendasar pada pola pembagian dan hubungan kewenangan antar pemerintahan dan keuangan antara pusat dan daerah.

Menurut Undang Undang No. 32 Tahun 2004, yang kemudian direvisi dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjelaskan Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam Sistem Negara Kesatuan Republik

Indonesia. Penyerahan hak, wewenang dan kewajiban dari pemerintah pusat kepada daerah otonom tersebut dikenal dengan istilah desentralisasi.

Memasuki tonggak era otonomi daerah memberikan dampak yang sangat besar terhadap sistem ketatanegaraan di Indonesia, dari negara yang sangat sentralistis menjadi negara yang desentralistis. Menurut Mardiasmo (2018:8-9) secara teoritis desentralisasi ini diharapkan akan memberikan dua manfaat nyata yaitu:

1. Mendorong peningkatan partisipasi, prakarsa, dan kreativitas masyarakat dalam pembangunan, serta mendorong pemerataan hasil pembangunan (keadilan) di seluruh daerah dengan memanfaatkan sumber daya dan potensi yang tersedia di masing-masing daerah.
2. Memperbaiki alokasi sumber daya produktif melalui pergeseran peran pengambilan keputusan publik ke tingkat pemerintah yang paling rendah yang memiliki informasi yang paling lengkap.

Desentralisasi mengemban misi utama berupa pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah yang lebih rendah, dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Kemudian, untuk mendukung desentralisasi kewenangan, pemerintah juga melakukan desentralisasi fiskal melalui perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) serta antar pemerintah daerah (Mardiasmo, 2018:7).

Desentralisasi fiskal merupakan inti dari desentralisasi itu sendiri karena pemberian kewenangan di bidang politik maupun administratif tanpa dibarengi

dengan desentralisasi fiskal merupakan desentralisasi yang sia-sia, sebab untuk melaksanakan kewenangan dan tanggungjawab serta tugas tugas pelayanan publik tanpa diberikan kewenangan dalam penerimaan maupun pengeluaran desentralisasi fiskal tidak akan efektif. Dengan demikian, desentralisasi fiskal akan memberi keleluasan kepada pemda untuk menggali potensi daerah daerah dan memperoleh transfer dari pusat dalam kerangka keseimbangan fiskal. (Supriyadi, Rahmadi dan Armandelis, 2013)

Menurut Prawirosetoto (2002) mendefinisikan Desentralisasi fiskal adalah pendelegasian tanggung jawab dan pembagian kekuasaan dan kewenangan untuk pengambilan keputusan di bidang fiskal yang meliputi aspek penerimaan (*tax assignment*) maupun aspek pengeluaran (*expenditure assignment*).

Desentralisasi fiskal dalam konteks Negara Kesatuan adalah penyerahan wewenang fiskal dari otoritas negara yang diwakili pemerintah pusat kepada daerah otonom. Kewenangan fiskal paling tidak mengandung pengertian kewenangan untuk mengelola pendapatan/perpajakan, keleluasaan untuk menentukan alokasi anggaran serta bagaimana mengalokasikan sumber daya yang dimiliki daerah untuk menyelenggarakan pelayanan publik yang menjadi tugas daerah (Firdausy, 2017:44).

Menurut Sidik (2002), beberapa faktor yang mendorong terjadinya desentralisasi fiskal di negara berkembang seperti indonesia, yaitu latar belakang suatu negara, peranan negara tersebut dalam globalisasi dunia, ketertinggalan dalam pembangunan ekonomi, tuntutan perubahan pada pelayanan masyarakat,

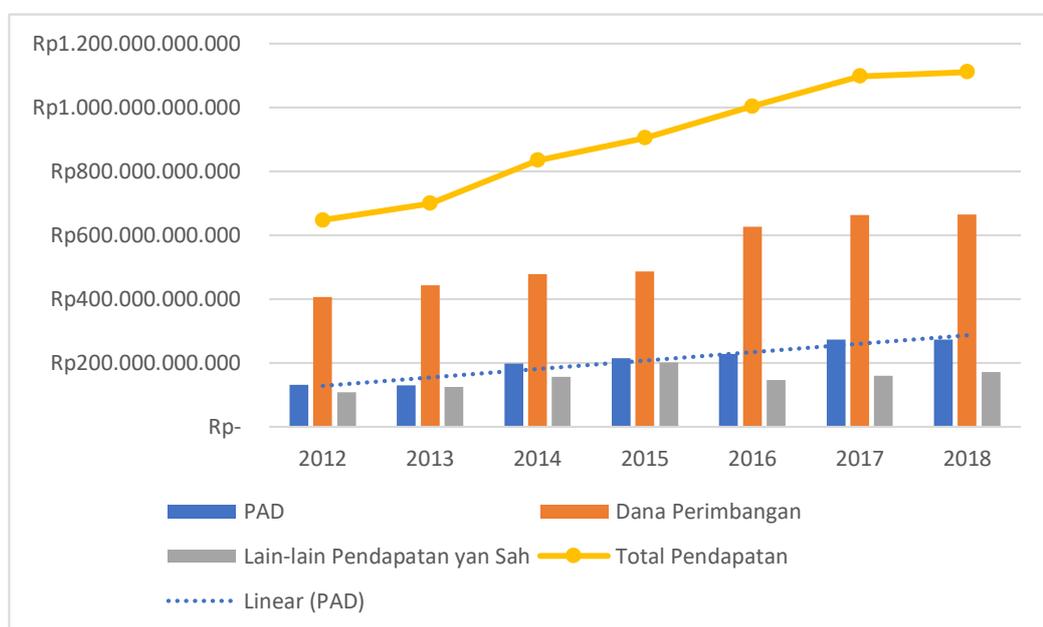
adanya perpecahan di beberapa negara, serta kegagalan pemerintah sentralistik dalam memberikan pelayanan publik yang efektif.

Menurut Bahl dalam suwandi (2015:26) Dalam melaksanakan desentralisasi fiskal prinsip (*rules*) *money should follow function* merupakan prinsip yang harus diperhatikan dan dilaksanakan. Artinya setiap penyerahan atau pelimpahan wewenang pemerintah membawa konsekuensi pada anggaran yang diperlukan untuk melaksanakan kewenangan tersebut, sehingga ada keseimbangan antara kewenangan atau urusan yang diserahkan kepada daerah dengan sumber pendanaannya.

Dalam rangka pelaksanaan kebijakan desentralisasi, maka kepada daerah diberikan pembagian bagi hasil penerimaan (*revenue sharing*) serta bantuan keuangan (*grant*) atau dikenal dengan dana perimbangan. Dana perimbangan adalah adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan diserahkan oleh pemerintah pusat kepada daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dimaksudkan untuk mengatasi ketimpangan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah dan antara pemerintah daerah dengan pemerintah daerah lainnya.

Selain itu Pemerintah Pusat juga memberikan dukungan dengan menyerahkan sumber-sumber penerimaan kepada daerah untuk dikelola secara optimal agar mampu membiayai daerahnya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, yaitu kewenangan untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai

dengan potensi yang dimiliki Daerah yang bersangkutan melalui Pendapatan Asli Daerah. Untuk itu, Pasal 5 ayat (1) UU 33/2004 memberikan cakupan sumber PAD yang luas mulai dari pajak dan retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Hal tersebut dilakukan untuk meminimalisir ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat melalui dana perimbangan yang diberikan, daerah dituntut dapat mengoptimalkan kemampuannya dalam menggali potensi pendapatan asli daerahnya. Daerah diperbolehkan meningkatkan pendapatan asli daerahnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Gambar 1.1 Grafik Perkembangan Realisasi Penerimaan Daerah Seluruh Indonesia 2012-2018

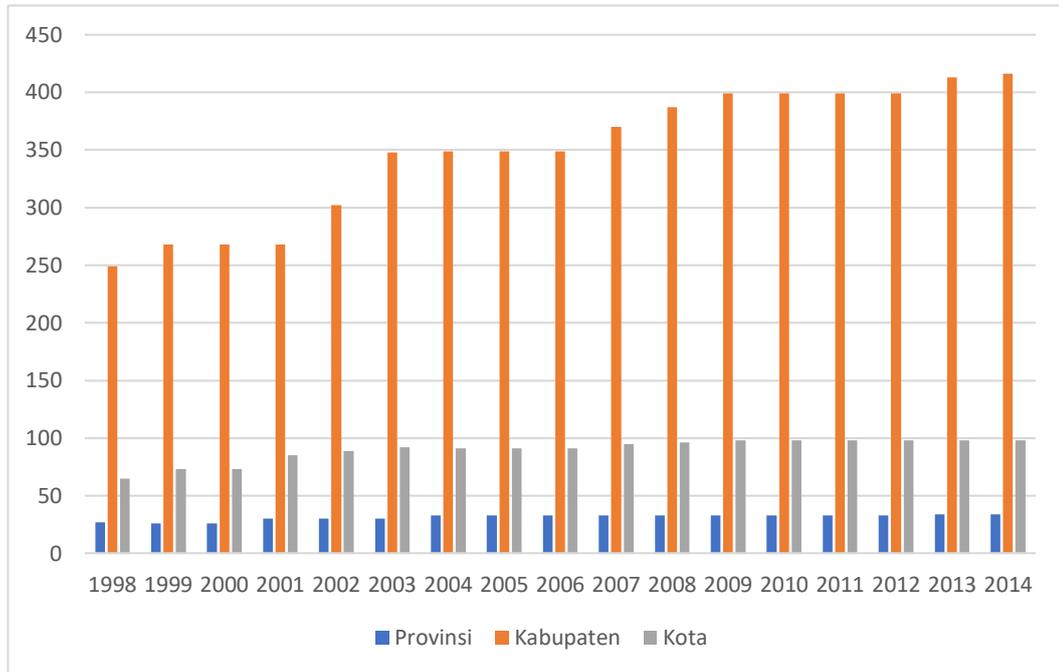
Sumber: BPS 2021 (data diolah)

Gambar 1.1 menunjukkan perkembangan penerimaan daerah Seluruh Indonesia kurun waktu 2012 sd. 2018. Dari grafik diatas kita dapat melihat fenomena yang terjadi bahwa pemerintah daerah belum mengoptimalkan

kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat untuk menggali sumber-sumber penerimaan yang bersumber dari PAD karena bisa kita lihat bahwa pertumbuhan PAD dan kontribusi PAD didalam APBD masih sangat kecil.

Dikutip dari situs kemenkeu.go.id yang dipublikasikan pada 20/01/2019 Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa Secara rata-rata nasional, ketergantungan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) terhadap TKDD sebesar 80,1%. Sementara, kontribusi pendapatan asli daerah (PAD) hanya sekitar 12,87%.

Belum optimalnya perolehan PAD menandakan kebijakan desentralisasi fiskal khususnya kewenangan dalam hal penerimaan/pendanaan (*revenue assignment*) masih belum optimal dalam pelaksanaannya. Yang mana Idealnya semua pengeluaran pemerintah daerah dapat dicukupi dengan Pendapatan Asli Daerah, namun faktanya pembiayaan rutin pemerintah daerah pun masih didanai oleh dana transfer dari pemerintah pusat. Hal tersebut terjadi karena selain dana perimbangan masih menjadi pembiayaan rutin juga karena dana perimbangan yang diharapkan menjadi pendorong penguatan pembangunan bahkan dijadikan celah bagi daerah untuk mengajukan pemekaran wilayah. Firdausy (2017:10) menyatakan bahwa sejak diberlakukannya otonomi daerah, beberapa daerah meminta untuk dilakukan pemekaran daerah yang bertujuan untuk meningkatkan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan PAD.



Gambar 1.2 Grafik Perkembangan Jumlah Pemerintah Daerah 1998 -2014

Sumber: BPS 2015 statistik 70 Tahun Indonesia Merdeka (data diolah)

Dilihat dari gambar diatas, grafik menunjukkan setelah diberlakukannya desentralisasi fiskal dan otonomi daerah, pembentukan daerah baru tersus terjadi, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Jika pada tahun 1998 jumlah provinsi yang ada di Indonesia berjumlah 27 provinsi, maka pada tahun 2014 bertambah menjadi 34 provinsi. Begitu juga daerah kabupaten dan kota yang semula hanya berjumlah 249 kabupaten dan 65 kota pada tahun 1998, pada tahun 2014 berjumlah 416 kabupaten dan 98 kota.

Namun demikian, sekitar 60% daerah yang telah mengalami pemekaran gagal meningkatkan PAD daerah tersebut, yang mana seharusnya daerah tersebut mampu meningkatkan PAD-nya berdasarkan potensi daerah yang dipromosikan pada saat pengajuan pemekaran daerah untuk menjadi daerah otonom. Fenomena

tersebut menunjukkan Implementasi dalam pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal belum sepenuhnya menunjukkan keberhasilan, daerah belum sepenuhnya memanfaatkan kewenangan secara optimal.

Selain itu pandemi covid-19 yang terjadi pada akhir tahun 2019 yang melanda seluruh dunia tentunya hal tersebut juga berdampak terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. banyak daerah yang mengeluhkan realisasi penerimaan pendapatan asli daerah yang tidak memenuhi target.

Pelaksanaan desentralisasi fiskal tentunya sangat berkaitan dengan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan yang merupakan salah satu indikator penting dalam pelaksanaan otonomi daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 12 tahun 2019 pada Pasal 1 ayat (2), pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah. Kegiatan pengelolaan APBD dimaksud meliputi kegiatan perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, dan pengawasan atau pengendalian anggaran, termasuk pelaporan pelaksanaan anggaran, atas semua komponen atau struktur APBD yakni Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan.

Menurut Permendagri No. 77 tahun 2020 Pengawasan dilakukan dalam bentuk audit, reuiu, evaluasi, pemantauan, bimbingan teknis, dan bentuk pengawasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Salah satu bentuk evaluasi dilakukan melalui evaluasi kinerja pengelolaan

keuangan daerah. Analisis terhadap kinerja keuangan merupakan informasi yang penting terutama untuk membuat kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah dan menilai apakah pemerintah berhasil mengelola keuangannya dengan baik, serta memberikan dampak yang positif terhadap kesejahteraan masyarakat.

Menurut indrawahyuni (2020) pengukuran kinerja penting dilakukan untuk dapat menilai akuntabilitas pemerintah daerah dalam pengelolaan pendapatan daerah dan dituangkan dalam bentuk laporan keuangan yang bertujuan untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, serta kinerja keuangan keuangan pemerintah daerah yang berguna dalam pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas pelaporan atas sumber daya yang dikelola oleh pemerintah.

Namun fenomena yang terjadi, Penggunaan analisis kinerja keuangan pada sektor publik khususnya pada APBD belum banyak dilakukan, seperti halnya pada sektor privat, sehingga secara teori belum ada kesepakatan mengenai nama dan kaidah pengukurannya. Namun meskipun demikian, dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien, dan akuntabel analisis rasio keuangan terhadap pemda perlu dilakukan meskipun kaidah pengakuntansian dalam APBD berbeda dengan laporan keuangan yang dimiliki perusahaan swasta (Halim, 2007:232)

Hal yang menyebabkan Penggunaan analisis kinerja keuangan pada sektor publik belum banyak dilakukan dikarenakan: (Halim,2007:230)

1. masih terbatasnya penyajian laporan keuangan pada organisasi pemerintah daerah yang sifat dan cakupannya berbeda dengan penyajian laporan keuangan oleh lembaga pemerintahan yang bersifat privat.
2. Selama ini penyusunan APBD sebagian masih dilakukan berdasarkan pertimbangan *incremental budget*, yaitu besarnya masing-masing pendapatan dan pengeluaran dihitung dengan sejumlah persentase tertentu.
3. penilaian keberhasilan APBD sebagai penilaian pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah lebih ditekankan pada pencapaian target, sehingga kurang memperhatikan perubahan yang terjadi pada komposisi ataupun struktur APBD.

Analisis kinerja keuangan pada APBD dilakukan dengan cara membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dengan periode sebelumnya, sehingga dapat diketahui kecenderungan yang terjadi. Selain itu dapat pula dilakukan dengan cara membandingkan dengan rasio keuangan yang dimiliki suatu pemerintah daerah tertentu dengan dengan rasio keuangan daerah lain yang terdekat ataupun yang potensi daerahnya relatif sama untuk dilihat bagaimana posisi rasio keuangan pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah daerah lainnya (Halim,2007:232)

Untuk menilai kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya, antara lain adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah ditetapkan dan dilaksanakan.

Berkaitan dengan desentralisasi fiskal, dimana pemerintah pusat melalui Undang-Undang No 33 tahun 2004 memberikan kewenangan kepada daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah yang bersangkutan melalui Pendapatan Asli Daerah nya, hal tersebut pun perlu dilakukan evaluasi, yang mana salah satunya yaitu dengan melakukan evaluasi terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah. Untuk menilai kinerja Pemerintah Daerah dalam mengelola Pendapatan Asli Daerah dapat dilakukan dengan menilai Efektivitas Pendapatan Asli Daerah dan Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah.

Efektivitas Pendapatan Asli Daerah adalah analisis yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Untuk mengukur Efektivitas PAD yaitu dengan menggunakan rasio Pertumbuhan PAD. Rasio Pertumbuhan PAD dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan PAD dengan target penerimaan PAD (dianggarkan) (Mahmudi, 2019:141)

Menurut Ulum (2009:32) menyatakan bahwa semakin tinggi Efektivitas Pendapatan Asli Daerah, maka semakin baik kinerja pemerintah daerah. Dalam artian Semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam meralisasikan PAD yang ditargetkannya maka hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tersebut telah mampu melaksanakan kewenangan dalam bidang keuangan (Desentralisasi Fiskal) yaitu kewenangan untuk mengelola pendapatan/perpajakan, sehingga realisasi pendapatan bisa sesuai dengan yang ditargetkan. Tingginya komposisi

penerimaan yang bersumber dari PAD di dalam APBD, dikarenakan pemerintah telah mampu meralisasikan PAD yang ditargetkannya menunjukkan kemampuan pemerintah daerah yang semakin tinggi dalam penyelenggaraan desentralisasi fiskal, karena pemerintah telah mampu mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah tersebut. Sehingga efektifitas PAD berhubungan dengan Desentralisasi Fiskal Daerah.

Sedangkan Pertumbuhan pendapatan Asli Daerah merupakan analisis yang digunakan untuk mengetahui kecenderungan baik berupa kenaikan ataupun penurunan kinerja Pendapatan Asli Daerah selama kurun waktu tertentu. Untuk mengukur Pertumbuhan PAD yaitu dengan menggunakan rasio Pertumbuhan PAD. Rasio Pertumbuhan PAD dihitung dengan cara membandingkan Realisasi penerimaan PAD tahun berjalan dikurangi Realisasi penerimaan PAD tahun sebelumnya dengan Realisasi penerimaan PAD tahun sebelumnya (Ulum,2009:33)

Mahmudi (2019:137) menyatakan Analisis pertumbuhan pendapatan bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama beberapa periode anggaran, kinerja anggarannya mengalami pertumbuhan pendapatan secara positif atau negatif. Pertumbuhan pendapatan ke arah positif menandakan kinerja pemerintah yang baik, artinya pemerintah daerah mampu mengoptimalkan kewenangan yang diberikan dalam bidang keuangan (desentralisasi fiskal) yaitu kewenangan untuk menggali dan mengenali potensi sumber-sumber penerimaan yang ada di daerah tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga setiap tahun

anggaran, PAD pemerintah daerah tersebut terus mengalami peningkatan. Santosa dan Rahayu (2005) menyebutkan bahwa Semakin besar PAD maka menunjukkan bahwa daerah mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dan ketergantungan terhadap Pemerintah Pusat berkurang. PAD yang terus mengalami peningkatan menunjukkan semakin tingginya kontribusi PAD dalam APBD yang berarti hal tersebut menunjukkan pemerintah daerah tersebut telah mampu menyelenggarakan desentralisasi fiskal. Dan akan terjadi hal yang sebaliknya jika pertumbuhan PAD negatif. Pertumbuhan Pendapatan ke arah yang negatif, menandakan bahwa terjadi penurunan kinerja pendapatan dan harus dicari penyebab penurunannya, apakah karena faktor ekonomi makro yang diluar kendali pemerintah atau karena manajemen keuangan daerah yang kurang baik. Dari paparan tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat hubungan antara pertumbuhan PAD dengan Desentralisasi Fiskal Daerah.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik melakukan penelitian mengenai Pengaruh Efektivitas Pendapatan Asli Daerah dan Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah terhadap desentralisasi fiskal daerah, adapun penelitian penelitian lain yang mendukung penelitian ini sebagai berikut:

1. Khoirul Aswar dan Lidya Primta Subakti (2013) dengan judul “Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Publik Kabupaten Kota Di Indonesia”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial desentralisasi fiskal berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Kenaikan Belanja Publik.

2. Anastasia Sianturi, Sjamsiar Sjamsuddin dan Tjahjanulin Domai (2014) dengan judul “Peran Pendapatan Asli daerah Dalam Menunjang Desentralisasi Fiskal Dan Pembangunan Daerah (Studi Pada Dinas Pendapatan Kota Batu)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi Pendapatan asli daerah dalam menunjang desentralisasi fiskal masih sangat kurang, karena pemerintah kota batu masih memiliki ketergantungan yang sangat tinggi kepada pemerintah pusat, dan juga desentralisasi fiskal kota batu yang masih sangat kurang, menunjukkan bahwa kota batu belum mandiri dalam pembiayaan pembangunan.
3. Fitria Yuliani Kartika dan Gregorius Nasiansenus Masdjojo (2017) dengan judul “Penelusuran Peranan Sumber Sumber Pendapatan Dan Fiscal Stress Terhadap Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten Kota Di Provinsi Jawa Tengah 2007-2011. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial PAD berpengaruh positif terhadap DDF, DAU berpengaruh negatif terhadap DDF, DAK berpengaruh negatif terhadap DDF, FS berpengaruh positif terhadap DDF.
4. Junita, Tona Aurora Lubis, dan H zamzami (2017) dengan judul “Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Kota Di Provinsi Jambi”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Desentralisasi Fiskal berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah kabupaten/kota jambi tahun 2010-2017.
5. Eugnia Christy, Een N Walewangko, Patrick Ch, wauran (2019) dengan judul “Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Kinerja Keuangan dan Pertumbuhan

Ekonomi di Provinsi Sulawesi Utara”. Hasil penelitian menunjukkan PAD dan Pendapatan Transfer sebagai variabel indikator desentralisasi fiskal berpengaruh signifikan dan mempunyai arah positif terhadap kinerja keuangan daerah di Provinsi Sulawesi Utara yang diukur dengan kemandirian keuangan daerah. Dan kinerja keuangan daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Utara.

6. Indrawahyuni (2020) dengan judul “Analisis Efektivitas dan Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar” Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat Efektivitas dan pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar tergolong efektif, yang mana hal tersebut ditunjukkan dengan realisasi penerimaan PAD lebih besar daripada yang ditargetkan, dan pertumbuhan PAD mengalami peningkatan setiap tahunnya, dan meskipun terjadi penurunan tidak terlalu drastis.
7. Supriyadi, Selamat Rahmadi, dan armandelis (2013) dengan judul “Analisis Desentralisasi Fiskal di Kabupaten Bungo”. Hasil penelitian menunjukkan desentralisasi fiskal Kabupaten Bungo adalah sangat kurang. Dimana untuk PAD rata rata derajat desentralisasi fiskalnya termasuk kategori sangat kurang, DBH Pajak dan Bukan Pajak rata rata derajat desentralisasi fiskalnya termasuk kategori kurang, dan Sumbangan/bantuan dari Provinsi dan Hibah Daerah derajat desentralisasi fiskalnya sangat kurang.
8. R. Dian Hardiana, Heraini Tanuatmodjo dan Firina Kurniati (2010) dengan judul “Desentralisasi Fiskal dan Tingkat Kemandirian Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2015-2019 (Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah

Menjelang Dua Dekade Otonomi Daerah di Indonesia)”. Hasil penelitian menunjukkan Kemandirian Daerah yang tercermin dari indikator derajat desentralisasi fiskal, rasio ketergantungan dan rasio kemandirian di kabupaten/kota di Jawa Barat masih relatif rendah meskipun terjadi peningkatan kategori pada setiap indikator. Dana Transfer masih menjadi sumber pendapatan utama pemerintah daerah, sehingga pola hubungan pemerintah pusat dan daerah di Jawa Barat masih kategori konsultatif dan partisipatif.

9. Sumardi (2014) dengan judul “Determinan Efektivitas Pengaruh Kebijakan Desentralisasi Fiskal Terhadap Kemampuan Keuangan Daerah Serta Dampaknya Pada Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Studi kasus: Kabupaten/Kota DI Jawa Tengah).” Hasil Penelitian Menunjukkan Tingkat Kemampuan Keuangan Daerah berpengaruh secara positif dan meyakinkan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Desentralisasi Fiskal berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Dan Struktur Belanja Daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.
10. Viozana Demora (2016) dengan judul “Analisis Derajat Desentralisasi dan Kemandirian PAD Serta Hubungannya Dengan Produktivitas Belanja Daerah Kota Jambi”. Dari hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara derajat desentralisasi dan kemandirian fiskal dengan produktivitas belanja di kota jambi tahun 2001-2013, mempunyai hubungan/korelasi tetap kuat dan nyata, dengan pola hubungan. yang positif.

11. Fikry Nugraha Ramadhan (2018) dengan judul “Analisis Kemandirian, Efektivitas, dan pertumbuhan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Provinsi Sulawesi Barat”. Hasil penelitian menunjukkan kinerja keuangan pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2013-2017, menunjukkan (1) kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan secara umum dinilai masih rendah sekali dan memiliki pola hubungan instruktif dengan tingkat kemandirian rata-rata hanya sebesar 19,65%. (2) Kinerja Efektivitas PAD, menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan PAD sesuai yang ditargetkan secara umum juga sudah positif dengan nilai rata rata tingkat Efektivitas PAD adalah sebesar 96,84%. (3) Kinerja Pertumbuhan Pendapatan menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerja pendapatan setiap tahun sudah positif dengan pertumbuhan yang beragam dan secara umum juga sudah positif dengan tingkat pertumbuhan pendapatan rata rata sebesar 13,87%.
12. Maulana Irwandi dan Muhammad Arya Arifin (2017) dengan judul “Analisis Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Untuk Menilai Kinerja Keuangan dan Aset Daerah Daerah (BPKAD) Kabupaten Musi Banyuasin. Hasil penelitian menunjukkan kinerja keuangan anggaran pendapatan dari tahun 2012 dan 2013 dapat dikatakan sudah sangat efektif karena sudah mencapai lebih dari 100%. Untuk pendapatan tahun 2014-2016 cukup efektif karena realisasinya kurang dari 100%, sedangkan untuk efisiensi PAD tahun 2012,2013, dan 2015 dikatakan cukup efisien, tahun 2014 dikatakan efisien, dan untuk tahun 2016 dikatakan tidak efisien.

13. Suci Defiana Rifit dan Desmiwerita (2020) dengan judul “Analisis Kinerja Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Datar”. Hasil analisis anggaran pendapatan dan belanja daerah dengan realisasinya pada Kabupaten Tanah Datar tahun anggaran 2010 – 2014 hasilnya adalah (1) Hasil Analisis Varians Kinerja pendapatan dan belanja pemerintah daerah dapat dikatakan baik. (2) Hasil analisis pertumbuhan, pertumbuhan pendapatan dan belanja dikategorikan positif. (3) Hasil analisis rasio keuangan menunjukkan rasio derajat desentralisasi kabupaten tanah datar masih sangat rendah, Rasio kemandirian dikategorikan rendah sekali dengan kategori instruktif.
14. Muhammad Yasin (2019) dengan judul “Analisis Tingkat Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Jawa Timur”. Hasil penelitian menunjukkan Pengaruh PAD terhadap kinerja keuangan adalah tidak signifikan dan arah hubungannya negatif. Pengaruh PAD terhadap Pertumbuhan Ekonomi adalah tidak signifikan dengan arah hubungan positif. Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap pertumbuhan Ekonomi adalah signifikan dengan arah hubungan yang positif.
15. Moch. Rudy Setyawan dan Syamsul Arif (2019) dengan Judul “Pengaruh Desentralisasi Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi serta Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Studi Kasus 9 Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2008-2017). Hasil penelitian menunjukkan Desentralisasi Fiskal, Pertumbuhan Ekonomi dan Belanja Modal berpengaruh signifikan terhadap

Indeks Pembangunan Manusia di 9 Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2008-2017.

16. Adissya Mega Christia dan Budi Ispriyanto (2019) dengan judul “Desentralisasi Fiskal dan Otonomi Daerah di Indonesia Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Perundang-undangan yang mengatur Desentralisasi Fiskal dan Otonomi Daerah di Indonesia mengalami perkembangan, namun sampai saat ini masih belum ada peraturan perundang-undangan yang *secara lex specialis* mengatur mengenai desentralisasi fiskal dan dalam otonomi daerah. Dan dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal masih terdapat beberapa kendala diantaranya pemanfaatan PAD, korupsi, pengawasan dari Pemerintah Pusat dan kurangnya peran serta masyarakat.
17. J. Marsudi, A Supardi dan F susandra (2019) dengan judul “Tingkat Kemandirian, Efisiensi, Efektivitas dan Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah: Kajian pada Provinsi Jawa Barat”. Hasil dari Uji pengaruh yang dilakukan menunjukkan bahwa kemandirian tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan PAD. Efisiensi berpengaruh negatif terhadap Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah. Efektivitas berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah . Dan tingkat Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tergolong kecil dengan nilai rata rata 28,5%, yang mana hal tersebut akibat masih belum meratanya pembangunan di setiap wilayah.
18. Pupung Puad Hasan (2014) dengan judul “Desentralisasi Fiskal dan Tingkat Kemandirian Daerah (Studi Pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa

Barat'. Hasil Penelitian menunjukkan Total pendapatan daerah kabupaten dan kota mengalami kenaikan yang fluktuatif, yang disebabkan karena potensi PAD dan Pendapatan transfer yang berbeda. Derajat desentralisasi fiskal selama 10 tahun berjalannya otonomi fiskal yakni 2001-2011 pemerintah kabupaten berada pada kategori kurang sampai sedang, yang berarti menunjukkan masih tingginya ketergantungan terhadap pemerintah pusat. Kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai belanja rutin masih bergantung pada pemerintah pusat.

19. Abdul Bashir (2011) dengan judul "Dampak Desentralisasi Fiskal terhadap Perekonomian Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan". Hasil penelitian menunjukkan (1) desentralisasi fiskal berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. (2) Desentralisasi Fiskal berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. (3) Desentralisasi Fiskal Berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin. (4) Desentralisasi Fiskal berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia (5) Desentralisasi Fiskal Berpengaruh secara positif dan tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja.
20. Juli Panglima Saragih (2014) dengan judul "Politik Desentralisasi Fiskal: Permasalahan dalam Implementasi". Hasil penelitian ini menyatakan bahwa dalam pelaksanaan desentralisasi masih terdapat permasalahan terkait dengan lemahnya kapasitas fiskal daerah, walau politik desentralisasi fiskal sejak otonomi daerah diberlakukan.

21. Adiwana Farhan Aritenang dan Freda Setiawan (2018) dengan judul "*The Impact of Fiscal Decentralization On Economic Performance In Indonesia*". Hasil penelitian menyatakan bahwa Desentralisasi Fiskal berpengaruh terhadap kinerja ekonomi pada nilai lag tiga tahun, hal tersebut menyiratkan bahwa penganggaran publik akan berdampak signifikan terhadap peningkatan kinerja ekonomi pada tiga tahun yang akan datang.
22. Iqbal Lhutfi, Hamzag Ritchi, dan Ivan Yudianto (2020). dengan Judul "*Do the Growth of Original Local Government Revenues and the Growth of Capital Expenditure Affect Fiscal Stress*". Hasil Penelitian menunjukkan bahwa secara simultan pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah dan Pertumbuhan Belanja Modal secara simultan berpengaruh terhadap *Fiscal Stress* di kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat. Secara Parsial pertumbuhan PAD berpengaruh negatif terhadap *Fiscal Stress* dan Pertumbuhan Belanja Modal berpengaruh tidak signifikan terhadap belanja modal di kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat
23. Nobu Akai dan Masayo Sakata (2002) dengan judul "*Fiscal decentralization contributes to economic growth: Evidence from state-level cross-section data for the United States*". Hasil penelitian menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

Tabel 1.1

Persamaan Dan Perbedaan Penelitian Terdahulu Dengan Penelitian Penulis

No	Nama, Tahun dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber
1	Khoirul Aswar dan Lidya Primta Subakti 2013 Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Publik Kabupaten Kota Di Indonesia.	<ul style="list-style-type: none"> • Desentralisasi Fiskal • Pendapatan Asli Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Belanja Publik 	Desentralisasi fiskal berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Kenaikan Belanja Publik.	Jurnal Proceeding PESAT Volume 5 November 2013 Universitas Gunadarma ISSN: 1858-2559
2	Anastasia Sianturi, Sjamsiar Sjamsuddin dan Tjahjanulin Domai 2014 Peran Pendapatan Asli daerah Dalam Menunjang Desentralisasi Fiskal Dan Pembangunan Daerah (Studi Pada Dinas Pendapatan Kota Batu)	<ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan Asli Daerah • Desentralisasi Fiskal 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan Daerah 	Kontribusi Pendapatan asli daerah dalam menunjang desentralisasi fiskal masih sangat kurang, karena pemerintah kota batu masih memiliki ketergantungan yang sangat tinggi kepada pemerintah pusat. Dan juga desentralisasi fiskal kota batu yang masih sangat kurang, menunjukkan bahwa kota batu belum mandiri dalam pembiayaan pembangunan.	Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 2, No. 3 2014 Universitas Brawijaya ISSN: 2503-3867
3	Fitria Yuliani Kartika 2017 Penelusuran Peranan Sumber Sumber Pendapatan Dan Fiscal Stress Terhadap Derajat Desentralisasi	<ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan Asli Daerah • Desentralisasi Fiskal 	<ul style="list-style-type: none"> • DAU • DAK • <i>Fiscal Stress</i> 	Secara parsial dan simultan PAD, DAU, DAK dan Fiscal Stress berpengaruh terhadap derajat desentralisasi fiskal.	Jurnal Telaah Manajemen, Volume 14, Edisi 1 Februari 2017 Universitas Stikubank Semarang ISSN: 1693-9727

	Fiskal Kabupaten Kota Di Provinsi Jawa Tengah 2007-2011				
4	Junita, Tona Aurora Lubis, dan H zamzami 2017 Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Kota Di Provinsi Jambi	• Desentralisasi Fiskal	• Kinerja Keuangan	Desentralisasi Fiskal berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah kabupaten/kota jambi tahun 2010-2017	Jurnal Akuntansi dan Keuangan UNJA Volume 2 No 1 2017 Universitas Jambi ISSN: 2460-6235
5	Eugnia Christy, Een N Walewangko, Patrick Ch, wauran 2019 Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Kinerja Keuangan dan Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sulawesi Utara	• Desentralisasi Fiskal	• Kinerja Keuangan	PAD dan Pendapatan Transfer sebagai variabel indikator desentralisasi fiskal berpengaruh signifikan dan mempunyai arah positif terhadap kinerja keuangan daerah di Provinsi Sulawesi Utara yang diukur dengan kemandirian keuangan daerah. Dan kinerja keuangan daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Utara.	Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Volume 19 No 4 2019 Universitas Sam Ratulangi
6	Indrawahyuni 2020 Analisis Efektivitas dan Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar	• Pertumbuhan PAD • Efektivitas PAD	Subjek Penelitian	Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat Efektivitas dan pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar tergolong efektif, yang mana hal tersebut ditunjukkan	Jurnal AkMen Volume 17 No. 3 September 2020 Universitas Muhammadiyah Makassar e- ISSN : 2621-4377

				dengan realisasi penerimaan PAD lebih besar daripada yang ditargetkan, dan pertumbuhan PAD mengalami peningkatan setiap tahunnya, dan meskipun terjadi penurunan tidak terlalu drastis.	
7	Supriyadi, Selamet Rahmadi, dan Armandelis 2013 Analisis Desentralisasi Fiskal di Kabupaten Bungo	• Desentralisasi Fiskal	• Subjek Penelitian	Desentralisasi fiskal Kabupaten Bungo adalah sangat kurang. Dimana untuk PAD rata rata derajat desentralisasi fiskalnya termasuk dalam kategori sangat kurang), DBH Pajak dan Bukan Pajak rata rata derajat desentralisasi termasuk kedalam kategori kurang, Sumbangan/bantuan dari Provinsi dan Hibah Daerah derajat desentralisasi fiskalnya termasuk kedalam kategori Sangat kurang.	Jurnal Perspektif dan Pembiayaan Daerah Volume 1 No 1 2013 Universitas Jambi ISSN: 2338-4603
8	R. Dian Hardiana, Heraini Tanuatmodjo dan Firina Kurniati 2010 Desentralisasi Fiskal dan Tingkat Kemandirian Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2015-2019	• Desentralisasi Fiskal	• Tingkat Kemandirian Daerah	Kemandirian Daerah yang tercermin dari indikator derajat desentralisasi fiskal, rasio ketergantungan dan rasio kemandirian di kabupaten /kota di Jawa Barat masih relatif rendah meskipun terjadi peningkatan	Jurnal Pendidikan dan Akuntansi dan Keuangan Volume 8 No. 2 Desember 2020 Universitas Pendidikan Indonesia

	(Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah Menjelang Dua Dekade Otonomi Daerah di Indonesia)			kategori pada setiap indikator. Dana Transfer masih menjadi sumber pendapatan utama pemerintah daerah, sehingga pola hubungan pemerintah pusat dan daerah di Jawa Barat masih kategori konsultatif dan partisipatif.	
9	Sumardi 2014 Determinan Efektivitas Pengaruh Kebijakan Desentralisasi Fiskal Terhadap Kemampuan Keuangan Daerah Serta Dampaknya Pada Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Studi kasus: Kabupaten/Kota DI Jawa Tengah.	<ul style="list-style-type: none"> • Desentralisasi Fiskal 	<ul style="list-style-type: none"> • Pertumbuhan Ekonomi • Tingkat Kemampuan Keuangan Daerah • Struktur Belanja Daerah 	Tingkat Kemampuan Keuangan Daerah berpengaruh secara positif dan meyakinkan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Desentralisasi Fiskal berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Dan Struktur Belanja Daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.	Journal Of Rural and Development Volume V No, 2 Agustus 2014 Universitas Negeri Semarang ISSN: 1978-9734
10	Viozana Demora 2016 Analisis Derajat Desentralisasi dan Kemandirian PAD Serta Hubungannya Dengan Produktivitas Belanja Daerah Kota Jambi.	<ul style="list-style-type: none"> • Desentralisasi Fiskal 	<ul style="list-style-type: none"> • Kemandirian Keuangan • Produktivitas Belanja Daerah 	Dari hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara derajat desentralisasi dan kemandirian fiskal dengan produktivitas belanja di kota jambi tahun	e-Jurnal Perspektif Ekonomi dan Pembangunan Daerah Volume 5 Universitas Jambi No.1 Januari-April 2016 ISSN: 2303-1255

				2001-2013, mempunyai hubungan/korelasi yang tetap kuat dan nyata, dengan pola hubungan yang positif.	
11	Fikry Nugraha Ramadhan 2018 Analisis Kemandirian, Efektivitas, dan pertumbuhan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Provinsi Sulawesi Barat	<ul style="list-style-type: none"> • Pertumbuhan PAD • Efektivitas PAD 	<ul style="list-style-type: none"> • Desentralisasi Fiskal 	(1) kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan secara umum dinilai masih rendah sekali dan memiliki pola hubungan instruktif. (2) Kinerja Efektivitas PAD, menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan PAD sesuai yang ditargetkan secara umum juga sudah positif. (3) Kinerja Pertumbuhan Pendapatan menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerja pendapatan setiap tahun sudah positif dengan pertumbuhan yang beragam dan secara umum juga sudah positif.	E-Prints Repository Software Universitas Negeri Makassar 2018
12	Maulana Irwandi dan Muhammad Arya Arifin 2017 Analisis Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD)	<ul style="list-style-type: none"> • Efektivitas Pendapatan Asli Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Desentralisasi Fiskal 	Kinerja keuangan anggaran pendapatan dari tahun 2012 dan 2013 dapat dikatakan sudah sangat efektif	Jurnal ACSY Politeknik Sekayu Volume VI, No. 2 Juli – Desember 2017.

	Untuk Menilai Kinerja Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Musi Banyuasin.			karena sudah mencapai lebih dari 100%. Untuk pendapatan tahun 2014-2016 cukup efektif karena realisasinya kurang dari 100%, sedangkan untuk efisiensi PAD tahun 2012,2013, dan 2015 dikatakan cukup efisien, tahun 2014 dikatakan efisien, dan untuk tahun 2016 dikatakan tidak efisien.	
13	Suci Defiana Rifit dan Desmiwerita 2020 Analisis Kinerja Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Datar.	<ul style="list-style-type: none"> • Pertumbuhan PAD • Desentralisasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Efektivitas PAD 	Hasil analisis anggaran pendapatan dan belanja daerah dengan realisasinya pada Kabupaten Tanah Datar tahun anggaran 2010 – 2014 hasilnya adalah (1) Hasil Analisis Varians Kinerja pendapatan dan belanja pemerintah daerah dapat dikatakan baik. (2) Hasil analisis pertumbuhan, pertumbuhan pendapatan dan belanja dikategorikan positif. (3) Hasil analisis rasio keuangan menunjukkan rasio derajat desentralisasi kabupaten tanah datar masih sangat rendah, Rasio kemandirian dikategorikan	Parseso Jurnal Volume 2 No. 2 Juni 2020 ISSN: 2656-8314

					rendah sekali dengan kategori instruktif.	
14	Muhammad Yasin 2019	Pendapatan Asli Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Kinerja Keuangan Daerah • Pertumbuhan Ekonomi 	Analisis Tingkat Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Jawa Timur.	<p>Pengaruh PAD terhadap kinerja keuangan adalah tidak signifikan dan arah hubungannya negatif. Pengaruh PAD terhadap Pertumbuhan Ekonomi adalah tidak signifikan dengan arah hubungan positif. Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap pertumbuhan Ekonomi adalah signifikan dengan arah hubungan yang positif.</p>	Jurnal Ekonomi dan Bisnis Volume 4 No 2 2019 Universitas 17 Agustus 1945 ISSN:2503-4634
15	Moch. Rudy Setyawan dan Syamsul Arif (2019)	Desentralisasi Fiskal	<ul style="list-style-type: none"> • Pertumbuhan Ekonomi • Belanja Modal • Indeks Pembangunan Manusia 	Pengaruh Desentralisasi Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi serta Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Studi Kasus 9 Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2008-2017).	Desentralisasi Fiskal, Pertumbuhan Ekonomi dan Belanja Modal berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di 9 Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2008-2017.	Jurnal Ekonomi dan Bisnis Volume 4 No 2 2019 Universitas 17 Agustus 1945 ISSN:2503-4634
16	Adissya Mega Christia dan Budi Ispriyanto 2019	Desentralisasi Fiskal	Otonomi Daerah	Desentralisasi Fiskal dan Otonomi Daerah di Indonesia	Peraturan Perundang-undangan yang mengatur Desentralisasi Fiskal dan Otonomi Daerah di Indonesia mengalami perkembangan, namun sampai saat ini masih ada peraturan	Jurnal Law Reform Volume 15 No. 1 2019 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

				perundang-undangan yang secara <i>lex specialis</i> mengatur mengenai desentralisasi fiskal dan dalam otonomi daerah. Dan dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal masih terdapat beberapa kendala diantaranya pemanfaatan PAD, korupsi, pengawasan dari Pemerintah Pusat dan kurangnya peran serta masyarakat.
17	Marsudi, A Supardi dan F susandra 2019 Tingkat Kemandirian, Efisiensi, Efektivitas dan Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah: Kajian pada Provinsi Jawa Barat	<ul style="list-style-type: none"> • Pertumbuhan PAD • Efektivitas PAD 	Subjek Penelitian	Hasil dari Uji pengaruh yang dilakukan menunjukkan bahwa kemandirian tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan PAD .Efisiensi berpengaruh negatif terhadap Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah. Efektivitas berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah, dan tingkat Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tergolong kecil dengan nilai rata rata 28,5%,

					yang mana hal tersebut akibat masih belum meratanya pembangunan di setiap wilayah.		
18	Pupung Hasan 2014	Puad Desentralisasi Fiskal dan Tingkat Kemandirian Daerah (Studi Pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat)	<ul style="list-style-type: none"> • Desentralisasi Fiskal 	<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat Kemandirian Daerah 	Total pendapatan daerah kabupaten dan kota mengalami kenaikan yang fluktuatif, yang disebabkan karena potensi PAD dan Pendapatan transfer yang berbeda. Derajat desentralisasi fiskal selama 10 tahun berjalannya otonomi fiskal yakni 2001-2011 pemerintah kabupaten berada pada kategori kurang sampai sedang, yang berarti menunjukkan masih tingginya ketergantungan terhadap pemerintah pusat. Kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai belanja rutin masih tergantung pada pemerintah pusat.	Jurnal Wacana Kinerja Volume 17 Edisi 2 FPEB Universitas Pendidikan Indonesia eISSN 2656-3266	
19	Abdul Bashir 2011	Dampak Desentralisasi Fiskal terhadap Perekonomian Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan	Desentralisasi Fiskal	<ul style="list-style-type: none"> • Pertumbuhan Ekonomi • Ketimpangan Pendapatan • Jumlah Penduduk Miskin • Indeks Pembangunan Manusia • Penyerapan Tenaga 	(1) Desentralisasi fiskal berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. (2) Desentralisasi Fiskal berpengaruh secara positif dan signifikan	Jurnal Kajian Ekonomi Volume 10 No. 2 2019 Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya ISSN: 1693-0436	

				Kerja	terhadap ketimpangan pendapatan. (3) Desentralisasi Fiskal Berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin. (4) Desentralisasi Fiskal berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. (5) Desentralisasi Fiskal Berpengaruh secara positif dan tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja	
20	Juli Saragih Panglima 2014 Politik Desentralisasi Fiskal: Permasalahan dalam Implementasi	Desentralisasi Fiskal	Subjek Penelitian	Hasil penelitian ini menyatakan bahwa dalam pelaksanaan desentralisasi masih terdapat permasalahan terkait dengan lemahnya kapasitas fiskal daerah, walau politik desentralisasi fiskal sejak otonomi daerah diberlakukan.	Jurnal Politica Vol. 5 No. 2 November 2014 DPR RI	
21	Adiwan Aritenang Farhan dan Freda Setiawan 2018 <i>The Impact of Fiscal Decentralization On Economic Performance In Indonesia</i>	Desentralisasi Fiskal	Kinerja Ekonomi	Desentralisasi Fiskal berpengaruh terhadap kinerja ekonomi pada nilai lag tiga tahun, hal tersebut menyiratkan bahwa penganggaran publik akan akan berdampak	IOP Conference Series : <i>Earth and Environmental Science</i> ; Vol. 340, No.1, Oct 2019. DOI: 10.1088/1755-1315/340/1/0120 21	

					signifikan terhadap peningkatan kinerja ekonomi pada tiga tahun yang akan datang.	
22	Iqbal Lhutfi, Hamzag Ritchi, dan Yudianto 2020 <i>Do the Growth of Original Local Government Revenues and the Growth of Capital Expenditure Affect Fiscal Stress</i>	Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Pertumbuhan Belanja Modal • <i>Fiscal Stress</i> 	Secara simultan pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal secara simultan berpengaruh terhadap <i>Fiscal Stress</i> di kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat. Secara Parsial pertumbuhan PAD berpengaruh negatif terhadap <i>Fiscal Stress</i> dan Pertumbuhan Belanja Modal berpengaruh tidak signifikan terhadap belanja modal di kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat	Journal of Economics, Business, and Accountancy Ventura Vol. 23, No. 1, April – July 2020 DOI: 10.14414/jebav.v23i1.1727	of and
23	Nobu Akai dan Masayo Sakata 2002 <i>Fiscal decentralization contributes to economic growth: Evidence from state-level cross-section data for the US</i>	Desentralisasi Fiskal	Pertumbuhan Ekonomi	Desentralisasi fiskal berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi	Journal of Urban Economics, Vol. 52, No. 1 <u>DOI:</u> 10.1016/S0094-1190(02)00018-9	

Andi Heryanto (2022) 183403013 Pengaruh Efektivitas Pendapatan Asli Daerah dan Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Desentralisasi Fiskal Daerah (Survei Pada Pemerintah Provinsi Di Indonesia Tahun 2015-2020)

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan Latar belakang yang diuraikan diatas, maka penulis merumuskan beberapa pertanyaan yang merupakan gambaran ruang lingkup penelitian yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana Efektivitas Pendapatan Asli Daerah, Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah dan Desentralisasi Fiskal Daerah Pada Pemerintah Provinsi Di Indonesia Tahun 2015-2020.
2. Bagaimana Pengaruh Efektivitas Pendapatan Asli Daerah dan Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah terhadap Desentralisasi Fiskal Daerah baik secara parsial maupun secara bersama-sama pada Pemerintah Provinsi di Indonesia Tahun 2015-2020.

1.3 Tujuan Penelitian

Dari permasalahan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Efektivitas Pendapatan Asli Daerah, Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah dan Desentralisasi Fiskal Daerah Pada Pemerintah Provinsi di Indonesia Tahun 2015-2020.
2. Untuk mengetahui Pengaruh Efektivitas Pendapatan Asli Daerah dan Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah terhadap Desentralisasi Fiskal Daerah baik secara parsial maupun secara bersama-sama pada Pemerintah Provinsi di Indonesia Tahun 2015-2020.

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Pengembangan Ilmu Pengetahuan.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan ilmu pengetahuan dalam bidang akuntansi sektor publik, khususnya untuk membahas Efektivitas Pendapatan Asli Daerah, Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah dan Desentralisasi Fiskal Daerah.

2. Terapan Ilmu Pengetahuan.

- a. Bagi penulis hasil penelitian ini diharapkan menambah ilmu pengetahuan penulis serta mengetahui penerapan ilmu akuntansi di bidang sektor publik.
- b. Bagi lembaga khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis, diharapkan menjadi tambahan bahan bacaan, referensi, bahan masukan dan perbandingan di perpustakaan yang dapat dijadikan sebagai bahan acuan bagi penelitian-penelitian selanjutnya.
- c. Bagi Pemerintah Daerah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi kerangka acuan dalam menerapkan instrumen pendapatan daerah dan mengambil kebijakan yang tepat sesuai koridor pelaksanaan desentralisasi fiskal yang ideal dalam rangka otonomi daerah.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Adapun penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Provinsi di Indonesia Tahun 2015-2020 yang data keuangannya dapat diakses melalui website resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan Badan Pusat Statistik.

1.5.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan mulai dari bulan September 2021 sampai dengan Mei 2022. Untuk lebih jelasnya disajikan tabel pada lampiran 1.